

Hasil Penelitian

MEMILIH UNTUK TIDAK MEMILIH: *PROTEST VOTING* DALAM PEMILU LOKAL DI KABUPATEN LEBAK, BANTEN

(*TO VOTE NOT TO VOTE: PROTEST VOTING OF LOCAL ELECTION IN LEBAK, BANTEN*)

Mahpudin

Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio Yustisia No.1, Karang Malang, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, 55281
Daerah Istimewa Yogyakarta - Indonesia
Email: Mahpudin95@mail.ugm.ac.id

Diterima: 10 Februari 2021; Direvisi: 21 Juli 2021; Disetujui: 01 Oktober 2021

ABSTRAK

Artikel ini membahas *protest voting* dalam konteks pilkada yang mengkontestasikan antara pasangan calon tunggal melawan kotak kosong. Kotak kosong dihadirkan untuk memberikan pilihan alternatif kepada warga negara yang tidak tertarik untuk memilih pasangan calon. Artikel ini berargumen bahwa kotak kosong menjadi instrumen bagi pemilih untuk menyampaikan protes. Menggunakan kasus Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018, artikel ini berusaha mencari jawaban atas pertanyaan mengapa sebagian pemilih tertarik untuk memilih kotak kosong, apa objek utama protes dan bagaimana protes tersebut dilakukan. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dipilih sebagai metode riset. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil temuan menunjukkan bahwa kotak kosong menjadi instrumen bagi masyarakat di wilayah Lebak Selatan, khususnya Kecamatan Malingping untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap calon kandidat yaitu Iti Octavia Jayabaya. Di sisi lain, *protest voting* menggunakan kotak kosong menyimpan dilema dan paradoks tersendiri. Beberapa pemilih yang protes tetap mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan memilih pasangan calon karena khawatir mendapat intimidasi dan alasan lainnya.

Kata kunci: *protest voting*, kotak kosong, calon tunggal, Pilkada Kabupaten Lebak

ABSTRACT

This article discusses protest voting in the context of regional elections, which contest between a single pair of candidates against an empty box. Empty box is presented to provide alternative options to citizens who are not interested in choosing a pair of candidates. This article argues that the empty box becomes an instrument for voters to protest. Using the case of the Lebak local election in 2018, this article seeks to find answers to the question of why some voters are interested in choosing an empty box, what is the main object of the protest, and how the protest was carried out. This type of qualitative research with a case study approach was chosen as the research method. Data collection was carried out through in-depth interviews and literature studies. The findings show that the empty box is an instrument for the people in South Lebak, especially Malingping District, to express their dissatisfaction with the candidate, Iti Octavia Jayabaya. On the other hand, protest voting using empty boxes keeps its dilemmas and paradoxes. Some protesting voters continued to express their dissatisfaction by selecting candidate pairs for fear of intimidation and other reasons.

Keywords: *protest voting, Empty box, single candidate, Lebak local election*

PENDAHULUAN

Pada arena kehidupan sosial politik, perasaan ketidakpuasan, kekecewaan, dan kemarahan individu atau kelompok, seringkali diekspresikan melalui sebuah tindakan protes. Tindakan protes diungkapkan melalui berbagai

bentuk seperti demonstrasi, petisi, mogok kerja, kekerasan, termasuk menggunakan instrumen elektoral yang populer dengan istilah *protest voting*. *Protest voting* sebagai bentuk baru bagi warga negara dalam mengekspresikan ketidakpuasan mereka menggunakan surat

suara (Cohen, 2018). Kajian tentang *protest voting* menjadi diskursus baru dalam arena politik elektoral pada dekade ini. Hal ini menuai perdebatan diantara para ahli dalam meletakkan konsep *protest voting* (Camatarri, 2019).

Implikasi dari perdebatan tersebut telah menghasilkan ragam pemahaman tentang apa itu *protest voting*. Para ahli berpendapat bahwa *protest voting* sebagai bentuk ekspresi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintahan (Bowler dan Lanoue, 1992), ketidakpercayaan dengan sistem politik yang ada (Bergh, 2004), kekecewaan terhadap elit politik yang berkuasa (van er Brug et al., 2000), dan perasaan kemarahan karena ketidakadilan dan ketidakberuntungan yang dialami oleh kelompok tertentu (Otjes, et al., 2008).

Camatarri (2019) berupaya menawarkan jalan keluar dari perdebatan tersebut dengan menawarkan dua kategori *protest voting* yaitu spasial dan aspasial. Spasial merujuk pada bentuk *protest voting* yang menekankan pada alasan ideologis, kebijakan, atau platform programatik. Sementara aspasial menempatkan ideologi dan kebijakan bukan sebagai alasan utama, melainkan protes terhadap elit politik.

Meskipun memiliki definisi yang beragam, namun *protest voting* diekspresikan dengan cara yang sama yaitu warga negara mendukung partai atau kandidat lain (non arus utama) yang bukan menjadi preferensi pilihan utama mereka. Artinya, warga negara memilih partai atau kandidat tersebut bukan karena tertarik, tetapi sebagai bentuk “menghukum” partai lain (PopEleches, 2010; Fiorina 1981). Kselman & Niou (2011) menyebut dengan memilih partai atau kandidat selain yang paling disukai sebagai sinyal ketidakpuasan. Bentuk *protest voting* ternyata tidak hanya dengan memilih partai alternatif tetapi juga dapat berupa *abstain* (tidak menggunakan hak pilih). Pilihan untuk *abstain* dapat dilakukan dengan cara merusak, mengosongkan, membuat tidak sah surat suara, atau sama sekali tidak datang ke tempat pemungutan suara (Hirschman, 1970).

Studi yang membahas tentang *protest voting* selama ini didominasi oleh kajian terhadap partai politik sebagai objek protes dengan ragam motif dan alasan yang melatarbelakanginya. *Protest voting* diekspresikan sebagai sinyal ketidakpuasan atau kritik terhadap partai politik dengan memilih partai politik yang lain yang jauh dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Studi Birch & Dennison (2019) mengungkap fenomena *protest voting* pada pemilu 2015 di Inggris Raya sebagai bentuk ketidakpuasan pemilih terhadap partai-partai arus utama yang dipengaruhi oleh tiga hal yaitu ideologi, *distrust* terhadap elit politik, dan

efek kampanye. Studi Otjes, et al., (2008) mengaitkan *protest voting* dengan kelompok yang tidak beruntung sebagai korban bencana. Mereka tidak percaya dan kecewa dengan kinerja pemerintah pusat dalam menanggulangi musibah tersebut. Implikasinya, warga negara memilih partai lokal (non pemerintah) yang independent pada pemilu lokal di Belanda sebagai bentuk protes terhadap pemerintah pusat.

Mengambil tiga negara sebagai objek kajian (Austria, Norwegia, dan Denmark), studi Bergh (2004) mengungkap partai-partai yang tidak memiliki peluang di pemerintahan meraup keuntungan dari *protest voting*. Protes ini ditujukan kepada elit partai yang berkuasa di pemerintahan. Sementara studi lainnya mengaitkan *protest voting* dengan sistem pemilu majority/plurality sebagai objek protes. Warga negara melakukan *protest voting* sebagai ekspresi kekecewaan dan ketidakpuasan memilih terhadap partai yang menjadi pilihan mereka dengan memilih partai alternatif lain. Alasan lainnya karena memilih partai tertentu bukan karena tertarik, tetapi karena tidak ada pilihan lain yang tersedia dalam pemilu. Di lain pihak, *protest voting* kerap menguntungkan partai-partai kecil untuk mendapat suara. (Lihat misalnya Kang, 2004; Kselman & Niou, 2014; Rosenstone, et al, 1996; Bowler dan Lanoue, 1992).

Mengacu pada studi terdahulu, kajian tentang *protest voting* lebih banyak menyoroti soal pemilihan partai, dimana *protest voting* dimaknai sebagai pemilih yang memilih anti kemapanan partai dengan memilih partai lain karena tidak percaya, kecewa, marah dan sebagainya. Selain itu, kajian yang ada juga meletakkan partai dalam konteks sistem pemilu majority/plurality. Partai-partai juga ditempatkan sebagai entitas yang masih memiliki garis demarkasi yang jelas dengan partai lain dalam hal platform ideologi dan kebijakan.

Belum banyak kajian yang membahas *protest voting* dalam konteks pemilihan calon kandidat untuk kekuasaan eksekutif. Padahal *protest voting* tidak hanya dikaitkan dengan partai tetapi juga dapat ditujukan kepada elit politik, termasuk calon kandidat (Bergh, 2004). Di sisi lain, dalam konteks politik Indonesia, *protest voting* terhadap calon kandidat (aktor/elit politik) menjadi menarik untuk dieksplorasi secara mendalam dibandingkan terhadap partai politik. Hal ini berdasarkan pada tiga pertimbangan.

Pertama, Indonesia menganut sistem pemilu proporsional dengan sistem pemerintahan presidensial, sehingga *protest*

voting terhadap partai kurang begitu relevan karena tidak mengenal istilah “*the winner takes all*”. *Kedua*, politik Indonesia hari ini menunjukkan gejala personifikasi partai (*figure-based parties*) yang ditandai oleh dominasi elit sebagai aktor politik (individu atau kelompok), bukan merepresentasikan kekuatan partai secara kelembagaan (lihat misalnya Tomsa, 2013; Ufen, 2008). *Ketiga*, partai politik cenderung pragmatis yang ditandai oleh rendahnya komitmen terhadap pijakan platform ideologi dan preferensi kebijakan partai (Aspinall & Sukmajati, 2016; Ambardi; 2009).

Implikasinya, *protest voting* dikaitkan dengan protes terhadap elit politik lebih relevan dibandingkan terhadap partai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, artikel ini berusaha melengkapi kajian yang telah ada dengan mengelaborasi lebih mendalam terkait isu *protest voting*. Artikel ini menempatkan *protest voting* secara spesifik terhadap calon kandidat sebagai objek protes. Menggunakan konteks pemilu lokal di Kabupaten Lebak tahun 2018, artikel ini membahas fenomena *protest voting* terhadap pasangan calon tunggal dengan memilih alternatif pilihan yang ada (atau sikap politik lainnya, seperti abstain) sebagai sinyal ketidakpuasan dan kekecewaan.

Pilkada Kabupaten Lebak 2018 hanya diikuti oleh satu pasangan calon yaitu Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi. Pasangan ini berhasil mendapat dukungan seluruh partai politik. Aturan pilkada dalam Undang Undang (UU) Nomor 10 tahun 2016 menyebut bahwa apabila suatu wilayah pemilihan hanya memiliki satu pasangan calon, maka akan berhadapan dengan kotak kosong. Kotak kosong menjadi fenomena baru dalam diskursus politik elektoral yang dimunculkan dengan tujuan memberi pilihan alternatif bagi pemilih yang tidak menginginkan untuk memilih pasangan calon. Dengan kata lain, kotak kosong dapat dikatakan sebagai simbol penolakan terhadap calon kandidat.

Artikel ini menempatkan kotak kosong sebagai bagian dari *protes voting* terhadap pasangan calon Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi. Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak menjadi lokus penelitian. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa wilayah tersebut menunjukkan perolehan jumlah suara kotak kosong yang sangat signifikan (44, 93 % suara). Bahkan, empat desa di Kecamatan Malingping berhasil memenangkan kotak kosong. Hal ini cukup mengejutkan sebab pada wilayah lain di Kabupaten Lebak, perolehan kotak kosong tidak signifikan dan keseluruhan memenangkan pasangan Iti-Ade. Meskipun apabila mengacu pada hasil akumulasi perolehan suara

menunjukkan kemenangan bagi pasangan calon (sebanyak 76, 96% suara, kotak kosong sebanyak 23, 04 % suara), tetapi fenomena *protes voting* di wilayah Malingping menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut. Artikel ini berargumen bahwa kotak kosong sebagai instrumen untuk menyampaikan protes politik melalui elektoral.

Protest voting dengan cara memilih kotak kosong termasuk kajian baru di Indonesia. Selama ini, *protest voting* pada umumnya diekspresikan dengan merusak kertas suara atau cara lain yang menyebabkan suara tersebut menjadi tidak sah. Dalam bentuk lain, protes juga dapat diekspresikan dengan cara abstain, atau populer dikenal dengan istilah “golput”. Studi Nyarwi (2009) misalnya memotret bagaimana fenomena golput diletakkan sebagai bentuk protes terhadap rezim otoritarianisme Soeharto.

Pada narasi yang berbeda, pemilih yang tidak berkenan dengan pilihan yang tersedia dalam pemilu, memiliki dua: opsi memilih partai atau calon lain dan abstain. Ketika kotak kosong diperkenalkan dalam desain pemilu lokal, maka kotak kosong dapat menjadi pilihan alternatif sebagai media protes, termasuk yang terjadi dalam konteks Pilkada Kabupaten Lebak. Artikel ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini: Mengapa pemilih melakukan *protest voting*? Apa objek utama dari protes, apakah memprotes elit politik, sistem politik, atau hanya kebijakan tertentu? Bagaimana bentuk protes tersebut dilakukan?

METODE

Artikel ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus dipilih sebab dianggap mampu memenuhi kebutuhan penelitian ini dalam memperdalam isu-isu sosial politik melalui kasus-kasus yang spesifik. Creswell (2014) berargumen bahwa penelitian menggunakan studi kasus menempatkan kasus-kasus tertentu yang muncul sebagai sebuah fenomena sosial politik untuk dieksplorasi secara mendalam dengan pembuktian ilmiah dan sumber informasi yang memadai. Adapun kasus yang dimaksud dalam studi ini adalah *protest voting* dalam Pilkada Kabupaten Lebak 2018. Lokus penelitian di wilayah Malingping, Lebak.

Proses pengumpulan mengelaborasi dua teknik secara bersamaan. *Pertama*, menggunakan data primer melalui wawancara mendalam terhadap sejumlah informan yang relevan. *Kedua*, menggunakan data sekunder dengan mengumpulkan berbagai bahan bacaan baik berupa buku, jurnal, makalah, dan informasi-

informasi yang tersedia secara online. Terkait dengan teknik analisa data, artikel ini mengikuti argumen Creswell (2014) yang terdiri dari beberapa tahapan secara berurutan, yaitu: menyiapkan dan mengorganisasi data, melakukan pengkajian dan analisa terhadap seluruh teks dan data yang diperoleh, mendeskripsikan data sesuai dengan konteks yang relevan, mengelompokkan data sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan menafsirkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setting Sosial Politik Lebak: Pembangunan Lamban dan Dominasi Politik Dinasti. Lebak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Wilayah yang dikenal dengan bumi Multatuli ini terletak tidak jauh dari Jakarta. Kendati demikian, kondisi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Lebak belum memuaskan. Di tahun 2015, Kabupaten Lebak pernah menyandang gelar sebagai daerah tertinggal di Indonesia yang dituangkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 (Kompas.com, 2019).

Meskipun pada tahun 2019 Kabupaten Lebak berhasil keluar dari status daerah tertinggal, tetapi potret pembangunan belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Masih di tahun yang sama, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menempatkan Lebak sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan IPM yang paling rendah di Provinsi Banten seperti disajikan pada Tabel 1.

Kabupaten Lebak termasuk memiliki wilayah yang sangat luas mencapai 304.4772 ha (3.305,07 km²). Artinya wilayah Lebak mencakup sepertiga luas wilayah Provinsi Banten atau setara lima kali luas Provinsi DKI Jakarta, Ibukota negara. Merujuk pada kondisi geografis, Kabupaten Lebak dibagi kedalam empat zona wilayah dengan karakteristik topografi dan potensi yang beragam.

Pertama, Lebak Utara, terdiri dari tujuh kecamatan dengan topografi berupa dataran

rendah dan perbukitan bergelombang. Wilayah ini di desain menjadi wilayah perdagangan dan industri. *Kedua*, Lebak Barat, terdiri dari tiga kecamatan dengan karakteristik topografi berupa Hutan dan Pegunungan sehingga didesain sebagai zona perkebunan dan pertanian. *Ketiga*, Lebak Timur, terdiri dari delapan kecamatan. Wilayah ini memiliki karakteristik yang sama dengan zona wilayah Lebak Barat. *Keempat*, Lebak Selatan, terdiri dari sepuluh kecamatan dengan karakteristik topografi berupa pegunungan dan pantai sehingga wilayah ini didesain untuk pembangunan di bidang pertanian, pertambangan, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Kecamatan Malingping terletak di wilayah Lebak Selatan.

Pada arena politik, Kabupaten Lebak dikuasai oleh dinasti politik Jayabaya yang berkuasa lebih dari lima belas tahun sampai saat ini. Mulyadi Jayabaya merupakan mantan Bupati Lebak dua periode (2003-2013). Selepas jabatannya berakhir, estafet kepemimpinan politik berhasil diteruskan oleh anaknya, Iti Octavia Jayabaya. Iti sukses mengulang keberhasilan ayahnya dengan menjadi bupati dua periode. Periode kedua diperoleh pada Pilkada Lebak 2018. Selama kepemimpinan politik Jayabaya, banyak anggota keluarga yang berhasil menduduki sejumlah jabatan politik strategis di parlemen maupun birokrasi baik di level lokal maupun nasional. Hal ini semakin memperkuat eksistensi politik dinasti Jayabaya (Susanti, 2020).

Keluarga Jayabaya merupakan politisi partai. Mulyadi Jayabaya adalah kader PDIP, sementara Iti Octavia adalah kader Partai Demokrat yang saat ini memegang posisi sebagai Ketua DPD Partai Demokrat tingkat Provinsi Banten. Mereka menjadikan dua partai tersebut sebagai mesin politik untuk memperluas dan mempertahankan kekuasaan. Selain menguasai panggung politik, keluarga Jayabaya tercatat memiliki sejumlah perusahaan. Kebanyakan perusahaan tersebut bergerak di bidang pertambangan dan konstruksi.

Tabel 1. Angka IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2019

Kab/ kota	Kota Tangerang Selatan	Kota Tangerang	Kota Cilegon	Kota Serang	Kab. Tangerang	Kab. Serang	Kab. Pandeg- lang	Kab. Lebak
IPM	81,84	78,43	73,01	72,10	71,93	66,38	64,91	63,37

Sumber: Data penelitian (2020)

Terbentuknya perusahaan Jayabaya tidak lepas dari *privilege* yang dimiliki sebagai penguasa politik dominan di Lebak. Banyak perusahaan miliknya yang terkoneksi dengan proyek-proyek pemerintah Lebak (Nur'aini, 2018). Singkatnya, Jayabaya merupakan representasi wajah *local strong men* dan oligarki yang hidup di level lokal. Posisinya semakin kuat sejalan dengan digulirkannya desain desentralisasi yang mengusung semangat otonomi di tingkat lokal (Nur'aini, 2018; Susanti, 2020; Zahrawan, 2019).

Uraian ini menunjukkan dua kondisi sosial politik di Lebak yaitu laju pembangunan yang lamban dan munculnya dominasi politik dinasti Jayabaya yang menguasai arena ekonomi politik di Lebak. Dua hal ini berkontribusi terhadap munculnya ketidakpuasan dan kekecewaan sebagian kelompok masyarakat di Lebak yang menginginkan adanya perubahan.

Pada satu sisi, kelompok masyarakat berharap kemajuan pembangunan di Lebak yang berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, mulai muncul kejenuhan terhadap kepemimpinan politik dinasti Jayabaya yang dianggap belum mampu membawa perubahan di Lebak secara signifikan. Kepemimpinan politik dinasti Jayabaya telah menghambat proses demokratisasi di tingkat lokal karena sirkulasi kepemimpinan politik tidak bekerja secara kompetitif (wawancara dengan Hakiki Hakim, 10 Juni 2020).

Tuntutan Pemekaran Daerah Dari Lebak Selatan. Laju pembangunan yang lamban dan dominasi politik dinasti Jayabaya mendapat respon yang serius dari kelompok masyarakat di wilayah Lebak Selatan. Mereka menginginkan berpisah dari Kabupaten Lebak dengan membentuk kabupaten baru yaitu Kabupaten Cilangkahan. Cilangkahan merupakan salah satu nama desa di Kecamatan Malingping yang rencananya akan dipersiapkan menjadi ibukota kabupaten ketika berhasil dimekarkan. Pada dasarnya, munculnya tuntutan pemekaran sudah ada sejak tahun 1985 pada masa rezim otoriter Soeharto berkuasa. Namun sampai saat ini, tuntutan tersebut belum juga tercapai. Terdapat dua alasan yang menjelaskan mengapa kelompok masyarakat di Lebak Selatan menginginkan pemekaran.

Pertama, pelayanan publik tidak efektif dan efisien. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Kabupaten Lebak memiliki wilayah yang sangat luas di provinsi Banten. Hal ini menyebabkan proses bekerjanya pelayanan publik tidak maksimal. Masyarakat Lebak Selatan yang ingin mengakses pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan pelayanan publik lainnya harus

datang ke Rangkasbitung, pusat pemerintahan Kabupaten Lebak. Jarak dari Lebak Selatan ke Rangkasbitung terbilang jauh dengan waktu tempuh sekitar tiga sampai empat jam. Padahal tidak semua masyarakat Lebak Selatan memiliki kendaraan. Di sisi lain, kondisi infrastruktur belum baik.

Upaya mengakses pelayanan publik harus mengorbankan waktu dan biaya. Tidak sedikit masyarakat yang lebih memilih untuk dikelola oleh aparat desa setempat meski harus berbayar sebagai bentuk kompensasi jasa. Kondisi ini memantik keinginan masyarakat Lebak Selatan untuk berpisah dari Kabupaten Lebak dengan membentuk daerah otonom baru. Harapannya, melalui pemekaran, akses pelayanan publik menjadi lebih dekat sehingga lebih efektif dan efisien. Sebagaimana diungkapkan oleh Subadri, Pengurus NU wilayah Malingping sebagai berikut.

"Kami mengeluh tentang pembuatan Kartu Keluarga dan KTP karena jaraknya jauh harus ke Rangkas. Bahkan masyarakat yang ingin membuat KTP dan dokumen lainnya harus membayar 100-150 ribu, kalau tidak memberi tidak jadi. Padahal gratis. Masyarakat paham kalau mengurus administrasi kependudukan gratis, hanya saja kalau minta diuruskan oleh pihak desa harus bayar. Masyarakat lebih memilih membayar dari pada mengurus sendiri ke Rangkas, karena biayanya bisa jadi jauh lebih besar untuk ongkos, makan dan sebagainya. Karena itu, kalau wilayah Selatan dimekarkan, minimal akses pelayanan bisa lebih dekat."
(Wawancara Subadri, 30 Agustus 2020).

Kedua, alasan sumber daya alam melimpah. Lebak Selatan ingin berpisah dari Kabupaten Lebak karena wilayah Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang cukup melimpah dibandingkan dengan wilayah lain di Lebak. Di selatan terdapat laut yang membentang luas dari Malingping hingga Bayah yang dapat dimanfaatkan untuk sektor kelautan dan perikanan. Banyak pantai dengan panorama yang indah sehingga dapat dijadikan sebagai objek pariwisata. Selain di Selatan, wilayah lain di Lebak tidak memiliki laut.

Selain itu, Lebak Selatan juga memiliki potensi alam berupa perkebunan dan pegunungan yang sebagian besar telah dimanfaatkan sebagai area perkebunan sawit, karet, dan aktivitas pertambangan. Namun, potensi yang luar biasa ini tidak berbanding

lurus dengan peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Selatan. Potret yang nampak justru pembangunan yang lamban dengan infrastruktur buruk dan kualitas SDM yang rendah.

Kondisi ini menyebabkan kekecewaan masyarakat di Lebak Selatan, mereka mengimajinasikan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi dengan memisahkan diri dari Kabupaten Lebak. Ketika Lebak Selatan berhasil membentuk daerah otonom, masyarakat memiliki kekuasaan dan kewenangan yang lebih besar untuk mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam yang ada. Sebab selama ini, pemerintah Kabupaten Lebak dianggap tidak berhasil dalam mengoptimalkan potensi sumber daya alam di Selatan bahkan hanya menjadi arena eksploitasi bagi kepentingan politik Dinasti Jayabaya. Sebagaimana pernyataan informan berikut ini:

"Mengapa ingin ada pemekaran karena kondisi sumber daya alam yang ada di Selatan lumayan menjanjikan seperti batu bara, emas, laut, pasir, dan sebagainya. Harapannya, dengan adanya pemekaran, wilayah Selatan bisa lebih maju dan mandiri. Karena dulu itu pembangunan dan perekonomian di Selatan masih sangat terbelakang. Infrastruktur jalan tidak bagus." (Wawancara dengan Rifai, 30 Agustus 2020).

Dua alasan tersebut menjadi dasar perjuangan masyarakat Lebak Selatan untuk menuntut pemekaran. Kelompok masyarakat melakukan berbagai upaya untuk merealisasikan tuntutan tersebut. Mereka membentuk berbagai wadah perkumpulan untuk konsolidasi dan melakukan berbagai agenda pergerakan (Delly, 2015). Termasuk melakukan lobi-lobi politik terhadap anggota DPRD dan Bupati Lebak agar memberikan persetujuan terkait pemekaran.

Organisasi yang fokus memperjuangkan agenda pemekaran Lebak Selatan adalah Bakor PKC (Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan). Kepengurusan Bakor PKC melibatkan berbagai kalangan seperti politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, dan kalangan pemuda. Struktur kepengurusan mencakup seluruh kecamatan yang ada di Lebak Selatan.

Janji Politik Jayabaya. Keinginan Lebak Selatan untuk pemekaran menemukan jalan buntu sebab bupati Lebak tidak pernah menyetujui wilayah Lebak Selatan berpisah dari Kabupaten Lebak. Selama menjadi Bupati Lebak

dua periode, Mulyadi Jayabaya secara konsisten menolak berbagai tuntutan pemekaran. Padahal, persetujuan dari Bupati merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi daerah yang menginginkan pemekaran. Hal ini memicu kemarahan kelompok masyarakat di Lebak Selatan. Puncaknya, pada tahun 2006, ribuan masyarakat Lebak Selatan mendatangi Rangkasbitung untuk melakukan demonstrasi. Mereka datang menaiki puluhan bus dan truk (Liputan6.com, 2007).

Aksi demonstrasi dilakukan di depan DPRD Kabupaten Lebak untuk mendesak agar DPRD menyetujui proposal pemekaran. Terdapat tiga tuntutan pada demonstrasi tersebut. *Pertama*, mendesak anggota DPRD Kabupaten Lebak yang berasal dari Daerah Pemilihan IV, V, dan VI untuk berjuang bersama-sama dengan masyarakat Lebak Selatan mewujudkan Lebak Wilayah Selatan menjadi sebuah Kabupaten; *Kedua*, menuntut DPRD Kabupaten Lebak untuk membentuk Panitia Khusus Pembentukan Kabupaten di Wilayah Lebak Selatan paling lambat satu bulan; *Ketiga*, meminta Bupati Lebak untuk segera merekomendasikan/mengusulkan wilayah Lebak Selatan dibentuk menjadi Kabupaten (Delly, 2015).

Aksi demonstrasi ini berhasil mengubah sikap politik DPRD Kabupaten Lebak. Seluruh fraksi menyetujui wilayah Lebak Selatan dimekarkan. Namun, berbeda dengan sikap politik Mulyadi Jayabaya. Ia tetap konsisten menolak pemekaran. Hal ini memicu kemarahan massa. Mereka merusak fasilitas gedung milik pemerintah, termasuk pendopo Bupati Lebak. Selama 10 tahun Mulyadi Jayabaya menjadi bupati Lebak (2003-2013), perjuangan untuk pemekaran belum juga terealisasi karena belum mendapat persetujuan dari bupati. Masyarakat Lebak Selatan semakin menaruh kebencian terhadap keluarga Jayabaya.

Pada tahun 2013, masa jabatan Mulyadi Jayabaya telah berakhir dan tidak bisa mengikuti pencalonan sebagai bupati karena telah menjabat dua periode. Oleh karena itu, pada Pilkada Lebak yang akan diselenggarakan pada tahun 2013 menjadi pertarungan politik bagi keberlangsungan politik Jayabaya. Mulyadi Jayabaya mendorong anaknya, Iti Octavia Jayabaya menjadi calon bupati dengan tujuan melanjutkan estafet kepemimpinan politik keluarga Jayabaya. Berbagai upaya dilakukan untuk memenangkan kompetisi elektoral. Hal tersebut membuat sikap politik Jayabaya berubah terkait dengan isu pemekaran. Di tahun 2013, Mulyadi Jayabaya menyetujui wilayah Lebak Selatan berpisah dari Kabupaten Lebak. Hal ini disambut dengan gembira oleh kelompok

masyarakat di Lebak Selatan. Perubahan sikap politik Jayabaya karena memiliki kepentingan suksesi elektoral.

Menyetujui wilayah Selatan dimekarkan merupakan satu strategi politik untuk mendapatkan simpati pemilih agar memilih Iti Octavia Jayabaya sebagai Bupati Lebak. Untuk menunjukkan keseriusan, Iti Octavia Jayabaya melakukan kampanye politik ke wilayah Lebak Selatan. Iti menjanjikan akan membantu terwujudnya Kabupaten Cilangkahan apabila berhasil terpilih menjadi bupati Lebak. Kampanye dilakukan secara terang-terangan di Alun-alun Malingping (Wawancara Subadri, 30 Agustus 2020).

Hasil pilkada Kabupaten Lebak 2013 menunjukkan terpilihnya pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebak periode 2013-2018. Kelompok masyarakat Lebak Selatan berharap bahwa Iti dapat menunaikan janji politiknya membantu proses pemekaran daerah. Meskipun kelompok masyarakat Lebak Selatan telah mendapatkan persetujuan pemekaran dari DPRD dan Bupati Lebak, tetapi perjuangan membentuk kabupaten baru belum juga terealisasi sampai saat ini. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan moratorium penundaan pemekaran sampai waktu yang belum dipastikan. Hal ini menghambat upaya Lebak Selatan membentuk Kabupaten Baru.

Pada sisi lain, kelompok masyarakat Lebak tidak melihat adanya keseriusan dari Iti Octavia Jayabaya untuk melakukan lobi-lobi politik kepada politisi di tingkat pusat. Hal ini memantik kemarahan masyarakat Lebak Selatan kepada keluarga Jayabaya sebab selama lebih dari 35 tahun, perjuangan membentuk daerah otonom baru belum juga terealisasi. Implikasinya, muncul narasi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa terpilihnya kembali bupati dari keluarga Jayabaya tidak membawa perubahan yang berarti termasuk soal isu pemekaran. Rasa ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan, dan ketidakpercayaan terhadap Iti Octavia Jayabaya terus terakumulasi. Ketidakpuasan kelompok masyarakat Lebak Selatan memuncak menjelang Pilkada Lebak 2018 ketika Iti Octavia Jayabaya kembali mencalonkan diri untuk menjadi bupati periode kedua.

Protest Voting Menggunakan Kotak Kosong. Jabatan politik Iti Octavia Jayabaya sebagai bupati Lebak pada periode pertama telah berakhir di tahun 2018. Untuk memastikan bahwa kekuasaan politik dinasti tetap berlangsung, Iti Octavia Jayabaya kembali mencalonkan diri pada Pilkada Lebak 2018. Iti

kembali menggandeng Ade Sumardi sebagai calon wakil bupati. Dominasi kekuatan ekonomi politik yang dimiliki keluarga Jayabaya mampu menyingkirkan lawan politiknya (Nuraini, 2018).

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa seluruh partai politik mengukung pencalonan Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi. Keberhasilan Iti Octavia Jayabaya dalam mendapatkan seluruh dukungan partai tidak terlepas dari privilege calon incumbent. Selain itu, Mulyadi Jayabaya turut melakukan berbagai manuver dan intervensi politik untuk memuluskan langkah anaknya kembali menjadi bupati (Susanti, 2020). Implikasinya, pasangan calon alternatif tidak mampu menyaingi calon incumbent.

Padahal, sebelum keriuhan pilkada dimulai, terdapat beberapa nama bakal calon yang muncul untuk menantang pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Bakal calon tersebut antara lain Ahmad Hakiki Hakim, Asep Awaluddin, Herman Firdaus, Cecep Sumarno, Saprudin, Ahmad Jazuli dan Sofyan. Diantara nama tersebut, empat bakal calon berasal dari wilayah Lebak Selatan yaitu Ahmad Hakiki Hakim, Asep Awaluddin, dan Herman Firdaus. Motif utama mereka mengikuti proses kandidasi adalah untuk memutus mata rantai dinasti politik Jayabaya. Hal ini sebagaimana diungkap oleh Jazuli sebagai berikut:

“Alasan mengapa saya ingin mencalonkan, pertama, secara formal saya ingin memajukan daerah Lebak yang masih masuk dalam kategori daerah tertinggal. Saya dari Malingping jadi merasakan betul bagaimana penderitaannya masyarakat. Politik Dinasti JB (Jayabaya) sudah berkuasa sejak tahun 2003, jadi sudah hampir 20 tahun Lebak dikuasai oleh dinasti JB dan menurut kami tidak ada kemajuan yang signifikan, antara lain tidak kreatif menghasilkan PAD. Bagaimana daerah mau maju kalau PAD nya tidak ada. Susah kalau hanya mengandalkan pendapatan dari pusat saja. Selain itu, dari aspek kesehatan masyarakat di Lebak, juga kurang bagus” (Wawancara dengan Jazuli, 16 Juni 2020)

Bakal pasangan calon melakukan lobi politik ke partai untuk mendapat rekomendasi pencalonan. Namun, mereka gagal karena seluruh partai telah menyatakan dukungan kepada calon *incumbent*. Tidak berhenti sampai di sini, mereka berusaha memanfaatkan jalur perseorangan dengan mengumpulkan foto *copy* KTP pemilih di Lebak untuk memenuhi syarat

pencalonan. Namun, upaya ini pun gagal. Akhirnya, Pilkada Lebak 2018 secara resmi hanya diikuti oleh satu pasangan calon, yaitu Iti Octavia Jayabaya dan Ade Sumardi. Dalam regulasi Pilkada, daerah yang hanya memiliki satu pasangan calon akan melawan kotak kosong.

Kegagalan bakal calon alternatif untuk maju di pilkada Lebak memicu ketidakpuasan. Begitu pula masyarakat di Lebak Selatan kecewa karena tidak ada satu pun figur dari wilayah mereka yang berhasil menjadi calon. Bakal calon yang gagal mengikuti pencalonan dan kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan Iti Octavia Jayabaya melakukan aksi kolektif untuk memobilisasi pemilih agar memilih kotak kosong.

Aksi kolektif ini dikenal dengan nama "Bajukoko" (Barisan Juang Kotak Kosong). Ahmad Hakiki Hakim menjadi ketua gerakan ini. Bajukoko melakukan kampanye kotak kosong ke berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk menghambat kemenangan pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Kampanye secara massif dilakukan di Lebak Selatan untuk meraih simpati masyarakat sebab masyarakat di Lebak Selatan sudah lama menyimpan ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap keluarga Jayabaya. Beberapa aktivis dan tokoh masyarakat di Lebak Selatan ikut bergabung dalam gerakan Bajukoko (wawancara dengan Sofyan, 23 Agustus 2020).

Hasil pilkada Lebak 2018 menunjukkan kemenangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi sebagai bupati dan wakil bupati Kabupaten Lebak untuk periode kedua (2018-2023). Mengacu pada perolehan suara yang dirilis oleh KPU Kabupaten Lebak, pasangan Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi memperoleh 76,96 % suara. Sementara kotak kosong memperoleh jumlah suara sebanyak 23,04 % seperti disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pilkada Kabupaten Lebak 2018

Kandidat	Jumlah	Persentase
Iti Jayabaya-Ade Sumardi	453.938	76,96%
Kotak Kosong	135.879	23,04%
Suara Sah	589.817	96,92%
Suara Tidak Sah	18.721	3,08%
Partisipasi pemilih	608.538	65,46%
Pemilih tidak berpartisipasi	321.029	34,54%
Pemilih terdaftar	929.567	100%

Sumber: Data penelitian (2020)

Meskipun kontestasi elektoral dimenangkan oleh pasangan calon incumbent, tetapi terdapat hal menarik dimana kotak kosong menjadi salah satu instrumen bagi pemilih untuk menyampaikan protes mereka. Hal yang paling mencolok nampak pada wilayah Lebak Selatan sebagai basis kantong suara kotak kosong. Perolehan kotak kosong di wilayah ini sangat signifikan dibandingkan dengan wilayah lain di Kabupaten Lebak. Perolehan suara yang sangat tinggi terdapat di Kecamatan Malingping dengan jumlah pemilih kotak kosong mencapai 44,92%. Bahkan lima desa di kecamatan ini berhasil memenangkan kotak kosong seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kemenangan Kotak Kosong di Kecamatan Malingping

Desa	Kotak Kosong	Pasangan calon
Cilangkahan	56,31 %	43,69%
Malingping Selatan	51,17 %	48,83%
Rahong	54,83%	45,17%
Sangiang	53,97%	46,03%
Sukamanah	58,74	41,26%

Sumber: Data penelitian (2020)

Tabel 3 menjelaskan bahwa kotak kosong dimaknai sebagai bentuk protes terhadap pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Banyak alasan yang melatarbelakangi lahirnya *protest voting* tersebut. *Pertama*, kecewa terdapat elit politik khususnya keluarga Jayabaya yang selama ini dianggap tidak memiliki komitmen dalam membantu proses pembentukan kabupaten baru di Lebak Selatan.

Sebagian kelompok masyarakat di Malingping menganggap bahwa Iti Octavia Jayabaya tidak dapat merealisasikan janji politiknya pada saat kampanye di pilkada sebelumnya. Janji politik yang dimaksud adalah Iti Octavia Jayabaya ketika terpilih menjadi bupati Lebak akan terlibat secara proaktif dalam melakukan lobi-lobi politik ke pemerintah pusat terkait pemekaran daerah.

Namun, selama periode kepemimpinan Iti, belum menunjukkan adanya kemajuan yang signifikan terkait isu pemekaran. Kelompok masyarakat di Malingping merasa hanya dijadikan alat oleh keluarga Jayabaya untuk kepentingan elektoral semata. Kekecewaan tersebut disampaikan dengan cara memilih kotak kosong dibandingkan pasangan calon. Kotak kosong menjadi simbol protes bagi kelompok masyarakat di Lebak Selatan. Hal ini sebagaimana dipertegas oleh pernyataan informan berikut ini.

Bagi kami, kotak kosong itu ekspresi kekecewaan. Jadi ini bentuk demo. Karena kalau demo ke Rangkas terlalu jauh. Jadi kotak kosong sebagai simbol demo. Kalau saya itu bahasanya, itu demo, kalau memang kita mau memisahkan diri dari Kabupaten Lebak, salah satu caranya dengan memilih kotak kosong. (Wawancara dengan Subadri, 30 Agustus 2020)

Kedua, ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Lebak selama dipimpin oleh keluarga Jayabaya. Sebagian besar kelompok masyarakat di Malingping lebih memilih kotak kosong dibandingkan pasangan calon karena didorong oleh adanya ketidakpuasan terhadap Iti Octavia Jayabaya selama menjabat sebagai Bupati. Lebih dari lima belas tahun kepemimpinan politik keluarga Jayabaya dianggap belum mampu membawa perubahan yang signifikan terhadap wajah pembangunan di Lebak.

Bahkan, laju pembangunan daerah cenderung lambat. Ketidakpuasan tersebut ini tertuju pada elit politik bukan sistem politik maupun kebijakan tertentu. Dengan kata lain, figur Iti Octavia Jayabaya menjadi simbol ketidakpuasan pemilih, yang mana kondisi pembangunan yang lambat karena kapabilitas kepemimpinan politik Iti Octavia Jayabaya dianggap belum memadai.

Hal ini dipertegas oleh pernyataan Yusuf (wawancara pada 28 Agustus 2020) bahwa dua periode kepemimpinan Mulyadi Jayabaya tidak membawa perubahan yang berarti, begitu pula dengan periode pertama kepemimpinan Iti Octavia Jayabaya. Memilih Iti Octavia Jayabaya untuk periode kedua dianggap sama halnya dengan mengorbankan masa depan Kabupaten Lebak lima tahun mendatang.

Ketiga, kejenuhan terhadap politik dinasti Jayabaya. Kekuasaan politik dinasti Jayabaya terbentuk sangat kuat dan sulit di-*counter* oleh kekuatan politik alternatif mana pun. Hadirnya pasangan calon tunggal menunjukkan betapa dominannya kekuasaan mereka. Kondisi ini perlahan menimbulkan kejenuhan terhadap praktik bekerjanya politik dinasti Jayabaya. Apalagi, kepemimpinan politik dinasti selama ini tidak berkorelasi secara positif terhadap pembangunan di Lebak.

Sebagian masyarakat di Lebak Selatan terutama wilayah Malingping merindukan hadirnya figur alternatif yang mampu menandingi kekuasaan politik Jayabaya dan memiliki kapabilitas kepemimpinan politik yang memadai untuk membangun Lebak. Kejenuhan tersebut direspon oleh elit politik di Lebak

Selatan untuk mencoba mengikuti proses kandidasi pada Pilkada Lebak. Namun, langkah mereka gagal.

Hal ini menghapus harapan masyarakat Lebak Selatan untuk memiliki calon bupati yang berasal dari wilayah mereka sendiri. Andaikan kontestasi elektoral pada pilkada Lebak diikuti oleh lebih dari satu pasangan calon, banyak masyarakat lebih memilih calon alternatif (wawancara dengan Wawan, 28 Agustus 2020). Namun kenyataan menunjukkan berbeda, kontestasi elektoral hanya diikuti oleh satu pasangan calon yang berasal dari incumbent, Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Oleh karena itu, sebagian masyarakat memilih kotak kosong sebagai ekspresi kejenuhan terhadap dinasti politik.

Berdasarkan pemaparan ini dapat ditarik benang merah bahwa *protest voting* menggunakan kotak kosong merupakan ekspresi ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan pemilih khususnya di wilayah Lebak Selatan, terutama Kecamatan Malingping. Kemenangan kotak kosong di empat desa menegaskan bahwa pemilih tidak menghendaki kembali terpilihnya Iti Octavia Jayabaya yang merepresentasikan kepentingan politik dinasti. *Protest voting* lebih mengarah pada elit politik, lebih tepatnya calon kandidat. Hal ini menegaskan bahwa *protest voting* yang bekerja dalam konteks politik elektoral di Lebak merupakan bentuk protes aspasial sebagaimana argumen Camatarri (2019), yaitu protes dilakukan terhadap elit politik bukan karena alasan ideologis, kebijakan, maupun platform programatik.

Memilih untuk Tidak Memilih: Dilema *Protest Voting*. Argumen bahwa memilih kotak kosong sebagai salah satu bentuk *protest voting* merupakan sebuah keniscayaan yang sulit disangkal. Sebab, dalam pilkada dengan satu pasangan calon, ketika pemilih lebih memilih kotak kosong dibandingkan pasangan calon dengan berbagai motif dan alasan yang melatarbelakanginya, maka dapat dikatakan bahwa pemilih tidak menghendaki terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah.

Karena tidak ada pilihan alternatif lain, pemilih mengalihkan suara mereka ke kotak kosong. Dengan kata lain, kotak kosong tidak hanya sebatas simbol tanpa makna. Kotak kosong menjadi alternatif politik bagi pemilih untuk mengekspresikan ide, gagasan, dan perasaan mereka, terutama ketidakpuasan dengan pilihan politik yang tersedia pada kontestasi elektoral.

Hal yang berbeda, ketika kontestasi elektoral diikuti lebih dari satu pasangan calon, pemilih yang tidak puas dengan salah satu

pasangan calon (dalam hal ini calon *incumbent*), dapat memilih pasangan calon yang lain. Namun dalam konteks Pilkada dengan satu pasangan calon, kotak kosong dirancang melalui rekayasa pemilu (*electoral engineering*) untuk dijadikan sebagai pilihan politik alternatif bagi pemilih yang tidak puas atau kecewa terhadap pasangan calon. Singkatnya, memilih kotak kosong dipahami sebagai bentuk tidak memilih calon.

Kendati demikian, artikel ini mengungkap bahwa *protest voting* dalam konteks pilkada dengan satu pasangan calon tidak hanya diekspresikan dengan memilih kotak kosong. Terdapat ekspresi lain untuk menunjukkan protes seperti memilih untuk abstain, yang mana pemilih memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya. Sebagaimana argumen Hirschman (1970), protes dapat dilakukan dengan cara abstain atau sama sekali tidak menggunakan hak pilih. Hal ini terkonfirmasi pada pilkada Kabupaten Lebak.

Mengacu pada data yang disajikan pada tabel 2 dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi pemilih sebesar 65 %. Sementara pemilih yang memutuskan untuk abstain sebesar 35 %. Penulis tidak bermaksud menggeneralisasi bahwa seluruh suara yang abstain adalah bentuk *protest voting*, karena abstain dapat terjadi karena alasan teknis. Point yang ingin disampaikan adalah abstain menjadi salah satu bentuk ekspresi *protest voting*.

Selain itu, kontestasi elektoral antara calon tunggal dan kotak kosong pada Pilkada Lebak 2018 menghadapi sebuah dilema dalam mengekspresikan *protes voting*. Berdasarkan wawancara terhadap sejumlah informan, beberapa pemilih yang tidak puas dan kecewa dengan pilihan politik yang ada, tidak menjadikan kotak kosong sebagai instrumen protes. Ketidakpuasan tersebut justru tetap diekspresikan dengan memilih pasangan calon yaitu Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi karena dilandasi oleh berbagai pertimbangan.

Sebagai contoh, salah satu informan bernama Yusuf, Guru SMA Malingping, menyebut bahwa dirinya tidak ingin memilih pasangan calon karena kinerja calon *incumbent* saat menjadi bupati mengecewakan. Yusuf menilai bahwa selama Iti Octavia Jayabaya menjabat menunjukkan belum ada keberpihakan melalui intervensi kebijakan pemerintah daerah terkait pembangunan dalam dunia pendidikan termasuk soal kesejahteraan tenaga pendidik honorer di Kabupaten Lebak. Ia juga termasuk pihak yang sangat mendukung terkait ide pemekaran di wilayah Lebak Selatan.

Tetapi, perasaan ketidakpuasan dan kekecewaan tersebut tidak diekspresikan dengan memilih kotak kosong melainkan tetap

memilih pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Hal ini tidak lepas karena adanya intervensi politik dari calon Petahana terhadap institusi pendidikan. Yusuf menyatakan bahwa calon *incumbent* berupaya mempengaruhi pilihan politik tenaga pendidik di Lebak untuk memilih dirinya dibandingkan kotak kosong.

Intervensi tersebut sangat signifikan dalam mempengaruhi preferensi pilihan politik para tenaga pendidik karena ada kekhawatiran mendapat intimidasi yang merugikan apabila mereka tidak memilih calon *incumbent*. Hal ini sangat dimungkinkan dilakukan oleh calon *incumbent* sebab pemerintah daerah memiliki kewenangan yang besar dalam mengelola institusi pendidikan sehingga calon *incumbent* memiliki peluang untuk memobilisasi para tenaga pendidik untuk kepentingan elektoral. Sebagaimana diungkap oleh Yusuf sebagai berikut:

"Saya sebenarnya merasa tidak puas dan kecewa dengan kinerja pemerintah Lebak, tetapi saya tidak memilih kotak kosong, tetap memilih Bu Iti. Mengapa? Karena ini terkait dengan pendidikan, bahwa secara tidak langsung institusi pendidikan terkait dengan pemerintah daerah, jadi ada himbuan untuk memilih pasangan calon Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi. Meskipun, hati kecil kami ingin memilih kotak kosong. Kami khawatir ada intimidasi juga. Kalau untuk pemekaran daerah, berpisah dari Kabupaten Lebak, saya setuju, sangat mendukung." (Wawancara dengan Yusuf pada 30 Agustus 2020).

Hal yang sama diungkap oleh informan lain bahwa ekspresi ketidakpuasan politik tidak diwujudkan dengan memilih kotak kosong sebagai bentuk *protest voting*, tetapi justru tetap memilih pasangan calon. Hal ini dikarenakan adanya persepsi yang berkembang di tengah masyarakat bahwa kotak kosong tidak memiliki konsep yang jelas. Bagi sebagian pemilih di Lebak, memilih kotak kosong dianggap tidak masuk akal karena kotak kosong bukan orang (calon kandidat) sehingga ketika kotak kosong menang tidak akan ada yang memimpin sebagai bupati Lebak secara sah dari hasil kontestasi elektoral.

Bahkan, persepsi yang berkembang di masyarakat adalah karena kotak kosong bukanlah orang (calon kandidat), maka memilih kotak kosong dianggap sama halnya dengan memilih "hantu". Oleh karena itu, pemilih lebih memilih Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi

sebagai pasangan calon tunggal dibandingkan kotak kosong meskipun pada dasarnya mereka tidak tertarik terhadap pasangan calon. Hal ini sebagaimana diungkap oleh H. Subali, salah satu informan, meskipun ia kecewa dengan keluarga Jayabaya terkait dengan keinginan pemekaran di wilayah Lebak Selatan, namun pada saat Pilkada, ia memilih pasangan calon bukan kotak kosong. Sebagaimana petikan hasil wawancara berikut ini.

“Selama kepemimpinan keluarga Jayabaya, masih banyak jalan yang rusak terutama jalan di desa. Selain itu keadaan kualitas pendidikan dan SDM di wilayah Lebak Selatan masih tertinggal, jadi kami ingin berpisah dari Kabupaten Lebak. Memilih kotak kosong adalah ekspresi kekecewaan. Tetapi saya tetap memilih pasangan calon (Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi) karena tidak ada pilihan yang lain. Saya tidak mau memilih yang tidak ada orangnya (kotak kosong), dari pada memilih hantu (kotak kosong), takut saya sama hantu.” (Wawancara H Subali, 27 Agustus 2020).

Persepsi yang keliru terkait dengan kotak kosong pada dasarnya menunjukkan bahwa proses pendidikan dan sosialisasi politik tidak berjalan maksimal. Hal tersebut juga tidak lepas dari konteks sosial di Lebak. Masyarakat Lebak mayoritas hidup di desa dengan kondisi kualitas pendidikan yang belum memadai. Selain itu, Lebak memiliki wilayah yang sangat luas sehingga sulit menjangkau pemilih hingga ke pelosok wilayah untuk memberikan sosialisasi politik terkait kotak kosong. Di sisi lain, kotak kosong merupakan konsep yang baru dalam sistem pemilu di tingkat lokal, sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan masyarakat terkait kotak kosong (wawancara Sofyan, 23 Agustus 2020).

Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh calon incumbent untuk membentuk narasi bahwa: *pertama*, memilih kotak kosong tidak rasional karena tidak ada calon pemimpinya. *Kedua*, memilih kotak kosong tidak menghargai kinerja pemerintah yang sudah berusaha membangun Kabupaten Lebak. *Ketiga*, memilih kotak kosong akan menghamburkan anggaran daerah karena apabila kotak kosong memenangkan kontestasi elektoral, maka pilkada akan diulang pada periode selanjutnya. Sementara, biaya pilkada bersumber dari APBD.

Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa *protest voting* menggunakan kotak kosong tidak familiar. Kondisi tersebut juga

menguntungkan calon incumbent untuk memenangkan kontestasi elektoral. Padahal, kotak kosong sengaja dihadirkan dalam desain pemilu lokal untuk memberikan pilihan politik alternatif bagi pemilih yang tidak ingin memilih pasangan calon. UU Nomor 10 tahun 2016 menyebut bahwa apabila perolehan suara kotak kosong lebih besar dibandingkan pasangan calon, maka jabatan bupati dan wakil bupati akan diisi oleh Penjabat Sementara (PJS) yang disahkan Kementerian Dalam Negeri melalui rekomendasi Gubernur.

PJS ini bekerja sampai bupati dan wakil bupati terpilih pada periode pilkada berikutnya. Namun narasi seperti ini tidak banyak dipahami oleh pemilih sehingga meskipun mereka memiliki rasa ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap calon incumbent, tetapi sebagian dari mereka tetap memilih pasangan calon karena menganggap tidak ada alternatif pilihan (wawancara Harris, 18 Agustus 2020). Dengan kata lain, bentuk ekspresi *protest voting* bervariasi. Sebagian pemilih yang merasa tidak puas, kecewa dan frustrasi terhadap figur Iti Octavia Jayabaya yang merepresentasikan kepentingan politik dinasti Jayabaya mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan memilih kotak kosong, abstain, bahkan memilih pasangan calon yang menjadi objek ketidakpuasan. Pada satu sisi, pilihan untuk memilih kotak kosong adalah wujud tidak untuk memilih calon incumbent (Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi). Di sisi lain, memilih pasangan calon bagi sebagian pemilih dapat dimaknai bukan karena tertarik, melainkan tidak ada pilihan politik yang tersedia yang lebih rasional dan menguntungkan.

KESIMPULAN

Protest voting menjadi sebuah keniscayaan dalam demokrasi elektoral untuk menyampaikan pesan ketidakpuasan, kemarahan, dan kekecewaan. Artikel ini menunjukkan terdapat variasi lain dari bentuk *protest voting* yaitu menggunakan kotak kosong dalam konteks pilkada dengan satu pasangan calon. Menggunakan kasus pilkada Kabupaten Lebak 2018, artikel ini berargumen bahwa kotak kosong menjadi instrumen bagi masyarakat di wilayah Lebak Selatan, khususnya Kecamatan Malingping untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap calon kandidat (elit politik) yaitu Iti Octavia Jayabaya. Protes terhadap Iti Octavia Jayabaya dikarenakan oleh berbagai faktor yaitu: (1) keinginan untuk pemekaran daerah yang tidak kunjung terealisasi sampai saat ini; (2) Ketidakpuasan dengan kinerja pemerintah Lebak; (3) kejenuhan terhadap politik dinasti Jayabaya. Dalam konteks

ini, figur Iti Octavia Jayabaya menjadi objek ketidakpuasan.

Protest voting menggunakan kotak kosong dibuktikan dengan perolehan suara kotak kosong yang signifikan di wilayah Lebak Selatan, terutama Kecamatan Malingping. Bahkan, empat desa di Kecamatan Malingping mampu memenangkan kotak kosong dibandingkan pasangan calon. Kendati demikian, *protest voting* menggunakan kotak kosong menyimpan dilema dan paradoks tersendiri. Beberapa pemilih yang protes tetap mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan memilih pasangan calon karena khawatir mendapat intimidasi dan alasan lainnya. Hal ini memiliki implikasi terhadap dua hal: di satu sisi, memilih kotak kosong adalah tidak untuk memilih pasangan calon. Di sisi lain, memilih pasangan calon bagi sebagian pemilih dimaknai bukan karena tertarik, melainkan tidak ada pilihan politik yang tersedia yang lebih rasional dan menguntungkan.

REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi stake holder yang berkepentingan dalam menyikapi isu tentang *protest voting*:

1. Kotak kosong harus diperkuat oleh payung hukum yang mengatur tentang kepemiluan di tingkat lokal. Hal ini untuk menciptakan nuansa persaingan yang lebih kompetitif antara calon tunggal melawan kotak kosong. Sebab selama ini kotak kosong berada dalam logika *uncontested election*. Misalnya, belum ada aturan yang spesifik perihal kampanye, sengketa gugatan terkait kotak kosong. Harapannya, ketika kotak kosong diperkuat oleh regulasi, pemilih memiliki alternatif pilihan yang rasional dalam pemilu lokal.
2. Pemerintah khususnya lembaga penyelenggara pemilu perlu melakukan pendidikan dan sosialisasi politik secara masif kepada pemilih di daerah yang memiliki satu pasangan calon. Hal ini untuk memberikan kesadaran kepada pemilih bahwa memilih calon atau kotak kosong sama-sama merupakan pilihan yang sah secara hukum.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Ambardi, Kuskridho. 2009. *Mengungkap Politik Kartel*. Jakarta: Gramedia.

Aspinall, Edward and Mada Sukmajati. 2016. 'Patronage and Clientelism in Indonesian Electoral Politics', In Edward Aspinall and Mada Sukmajati (eds), *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*, pp. 1-38, Singapore: NUS Press.

Bergh, Johannes. 2004. *Protest Voting in Austria, Denmark, and Norway*. Scandinavian Political Studies.

Birch, S., London, C., & Dennison, J. 2019. How protest voters choose. February 2017.

Bowler S and Lanoue DJ (1992) Strategic and protest voting for third parties: the case of the Canadian NDP. *Western Political Quarterly* 45(2) hal 485-499.

Camatarri, S. 2020. Piecing the Puzzle Together: A Critical Review of Contemporary Research on Protest Voting. *Political Studies Review* 18(4) hal 611-619.

Cohen, M. J. 2018. Protesting via the Null Ballot: An Assessment of the Decision to Cast an Invalid Vote in Latin America. *Political Behavior*, 40(2) hal 395-414.

Creswell, J. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Delly, Massaputro. 2015. *Calon Kabupaten Cilangkahan, Menuju Kabupaten Cilangkahan*. [Online] Dari: <https://biropemerintahan.bantenprov.go.id/calon-> [Diakses: 20 September 2020].

kabupaten-cilangkahanHirschman AO. 1970. *Exit, Voice and Loyalty: Responses to Declines in Firms, Organizations and States*. Cambridge: Harvard University Press.

Kang WT. 2004. Protest voting and abstention under plurality rule elections: an alternative public choice approach. *Journal of Theoretical Politics*. 16(1) hal 79-102.

Kernell, S. 1977. "Presidential Popularity and Negative Voting: An Alternative Explanation of the Midterm Congressional Decline of the President's Party." *American Political Science Review* 71 hal: 44-66.

Kompas.com. Dua Kabupaten di Banten Keluar dari Status Daerah Tertinggal. [Online] Dari: <https://regional.kompas.com/read/2019/08/02/17310091/dua-kabupaten-di-banten-keluar-dari-status-daerah-tertinggal> [Diakses: 15 Mei 2020]

Kselman D and Niou E. 2011. Protest voting in plurality elections: a theory of voter signaling. *Public Choice* 148 hal. 395-418.

Liputan6.com. 2007. Ribuan Warga Lebak Menuntut Pemekaran Wilayah. [Online] Dari: <https://www.liputan6.com/news/read/137377/ribu>

an-warga-lebak-menuntut-pemekaran-wilayah
[Diakses: 20 Agustus 2020].

Nur'aini, R. V. 2018. Lahirnya Dinasti Politik, Studi Kasus Terbentuknya Dinasti Politik Mulyadi Jayabaya Di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten (Periode 2003-2017). Yogyakarta: Skripsi Universitas Gadjah Mada.

Nyarwi. 2009. Golput Pasca Orde Baru: Merekonstruksi Ulang Dua Perspektif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12(3) hal 257-390.

Otjes, S., Stroebe, K., & Postmes, T. 2020. When Voting Becomes Protest : Mapping Determinants of Collective Action Onto Voting Behavior. 11(4), hal 513-521.

Pop-Eleches G. 2010. Throwing out the bums: protest voting and unorthodox parties after communism. *World Politics* 62(2) hal 221-260.

Rosenstone, Steven J., Roy L. Behr, and Edward H. Lazarus. 1996. *Third Parties in America. Citizen Response to Major Party Failure*. Princeton University Press: Princeton.

Susanti, C. 2020. Calon Tunggal Dan Orang Kuat Lokal (Studi Kasus Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Langsung Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lebak Tahun 2018). Jakarta: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

Tomsa, Dirk. 2013. 'What type of party? Southeast Asian parties between clientelism and electoralism' In Dirk Tomsa and Andreas Ufen (eds), *Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and Electoral Competition in Indonesia, Thailand and the Philippines*, pp. 20-39. London and New York: Routledge.

Ufen, Andreas. 2008. 'Political party and party system institutionalization in Southeast Asia: Lessons for democratic consolidation in Indonesia, the Philippines and Thailand', *Pacific Review*, 21(3) hal 327-350.

Van der Brug W, Fennema M and Tillie J. 2000. Anti-immigrant parties in Europe: ideological or protest vote? *European Journal of Political Research* 37.hal: 77-102.

Zahrawan, N. 2019. *Problem Partai-Partai Dalam Rekrutmen Calon Kepala Daerah: Kemunculan Calon Tunggal Pada Pilkada Lebak Tahun 2018*. Banten: Skripsi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.